

**DOKUMEN REKAP KUISIONER
TATA PAMONG UPPS DAN PS
DEPARTEMEN TEKNOLOGI HAYATI DAN VETERINER**



**Untuk:
AKREDITASI BAN-PT**

**DEPARTEMEN TEKNOLOGI HAYATI DAN VETERINER
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

**DOKUMEN REKAP KUISIONER
TATA PAMONG UPPS DAN PS
DEPARTEMEN TEKNOLOGI HAYATI DAN VETERINER**

Yogyakarta, 27 November 2024

Mengetahui,

Ketua Departemen

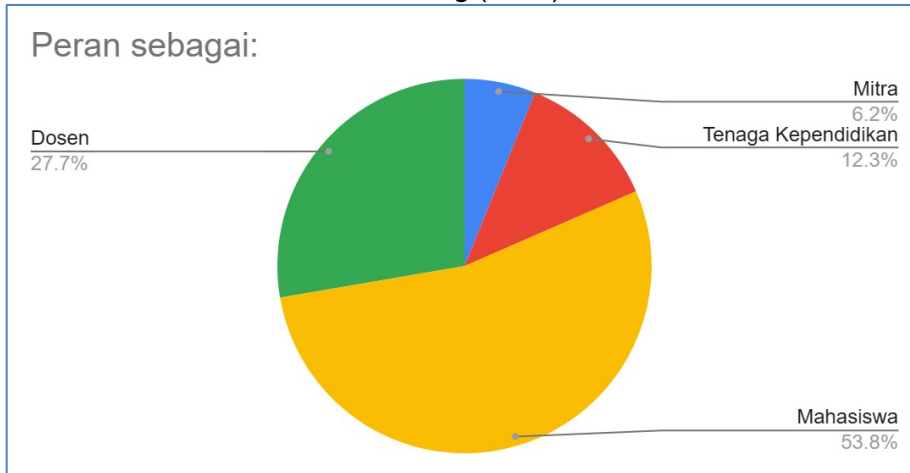
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ida Tjahajati', with a stylized flourish at the end.

**Prof. Dr. drh. Ida Tjahajati, M.P.
NIP. 196412281990032001**

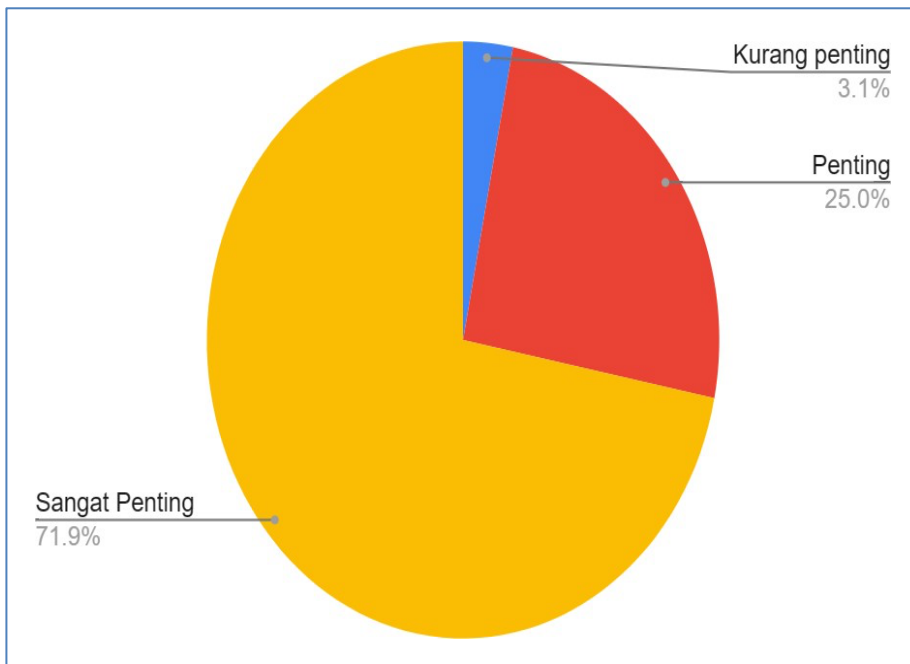
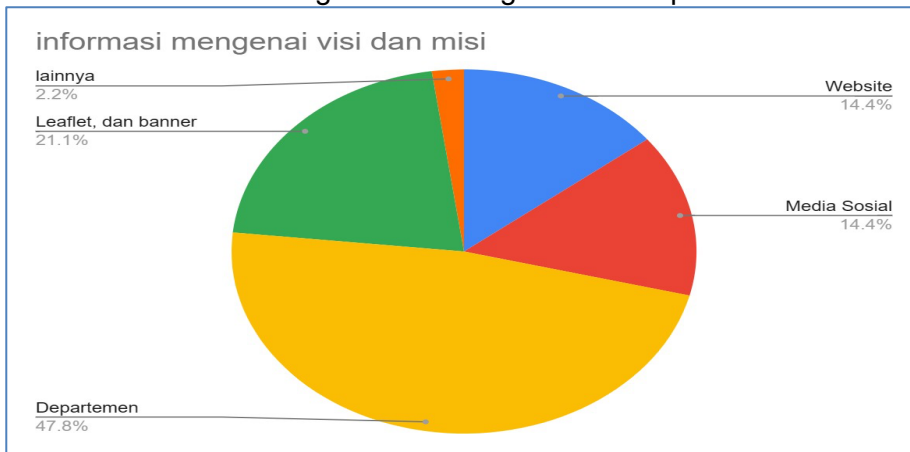
Executive Summary

Pengambilan data melalui kuisisioner bertujuan untuk mengevaluasi kinerja tata pamong dan tata kelola UPPS dan PS periode 2021-2023. Data disebar kepada *civitas akademika* UPPS dan PS melalui fasilitas **google form**. Hasil kuisisioner menunjukkan bahwa pada periode 2021-2023, pengelola UPPS dan PS telah melakukan Lima pilar *Good Governance Practices* beserta 6 fungsi manajemen.

Kuisisioner Visi Misi dan tata Pamong (2023)



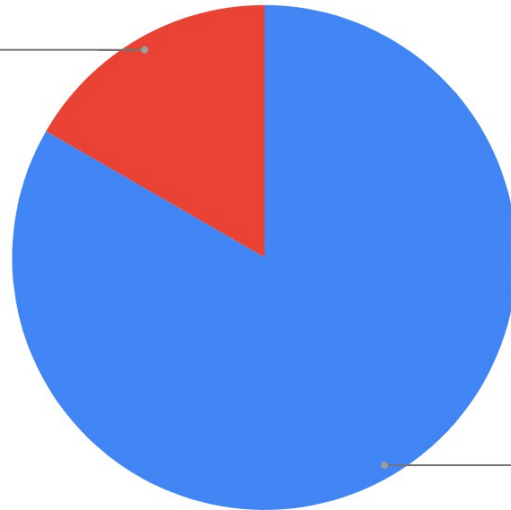
Dari mana saudara mengetahui tentang visi misi Departemen THV?



Seberapa penting visi misi Departemen THV
Pemahaman saudara tentang visi misi Departemen THV

Struktur organisasi UPPS telah disosialisasikan kepada Civitas Akademika dan Stakeholder

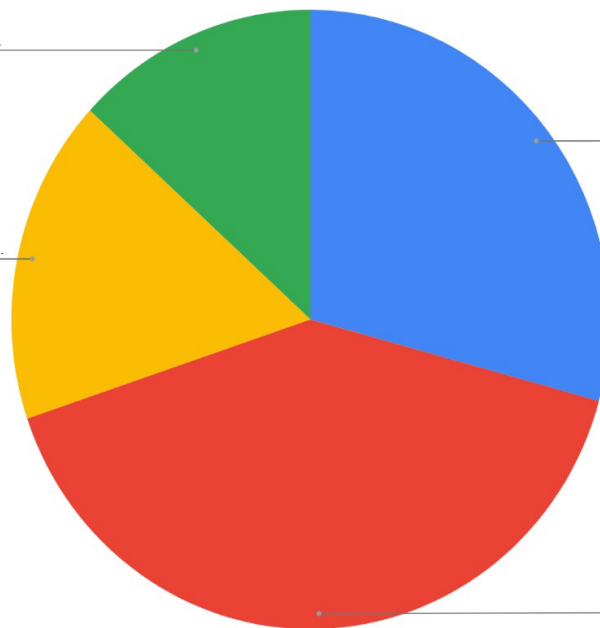
tidak
16.7%



ya
83.3%

Pengembangan kerjasama d...
13.2%

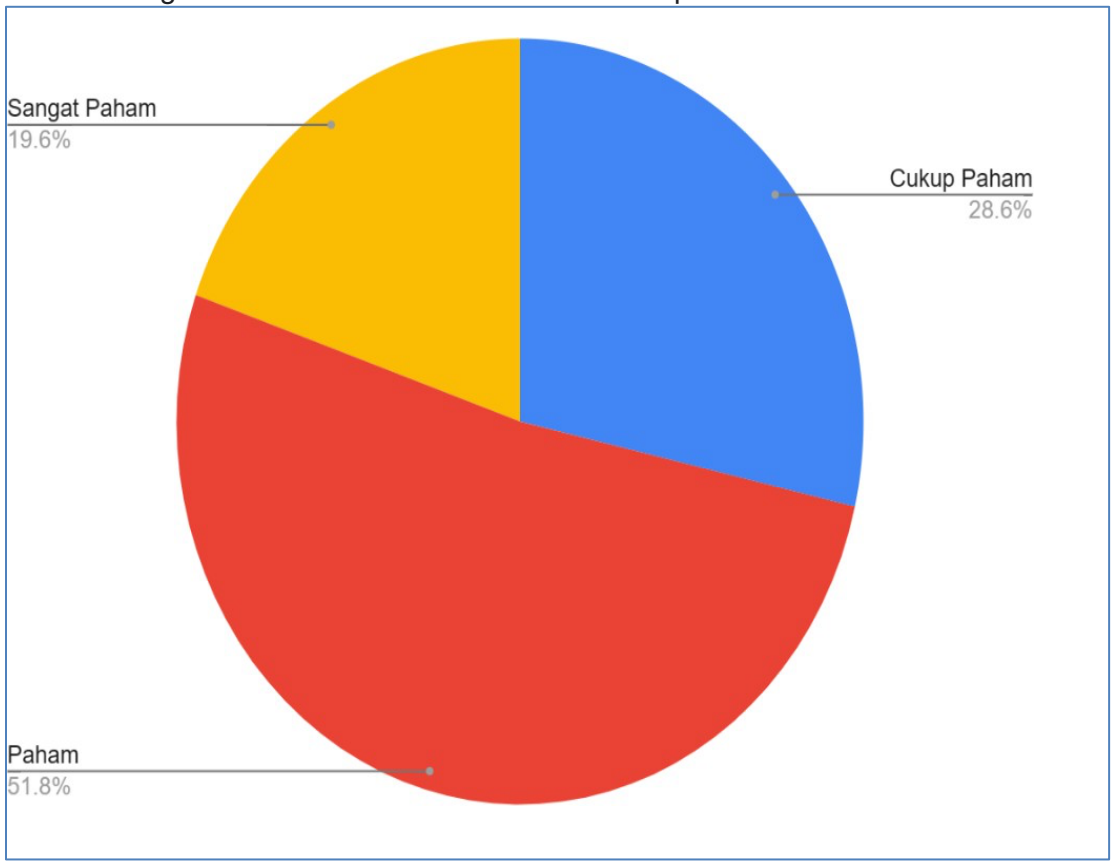
Pengembangan diri melalui p...
17.0%



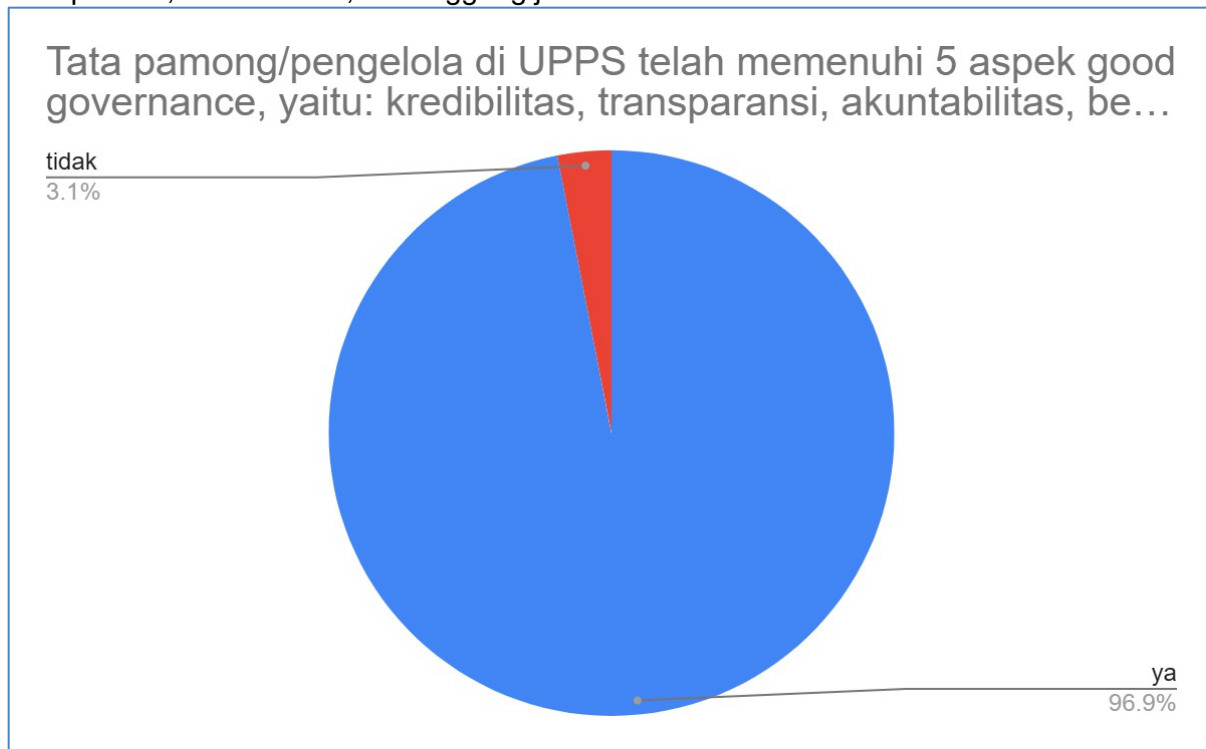
Fasilitas penunjang akademi...
29.2%

Kesempatan beasiswa
40.6%

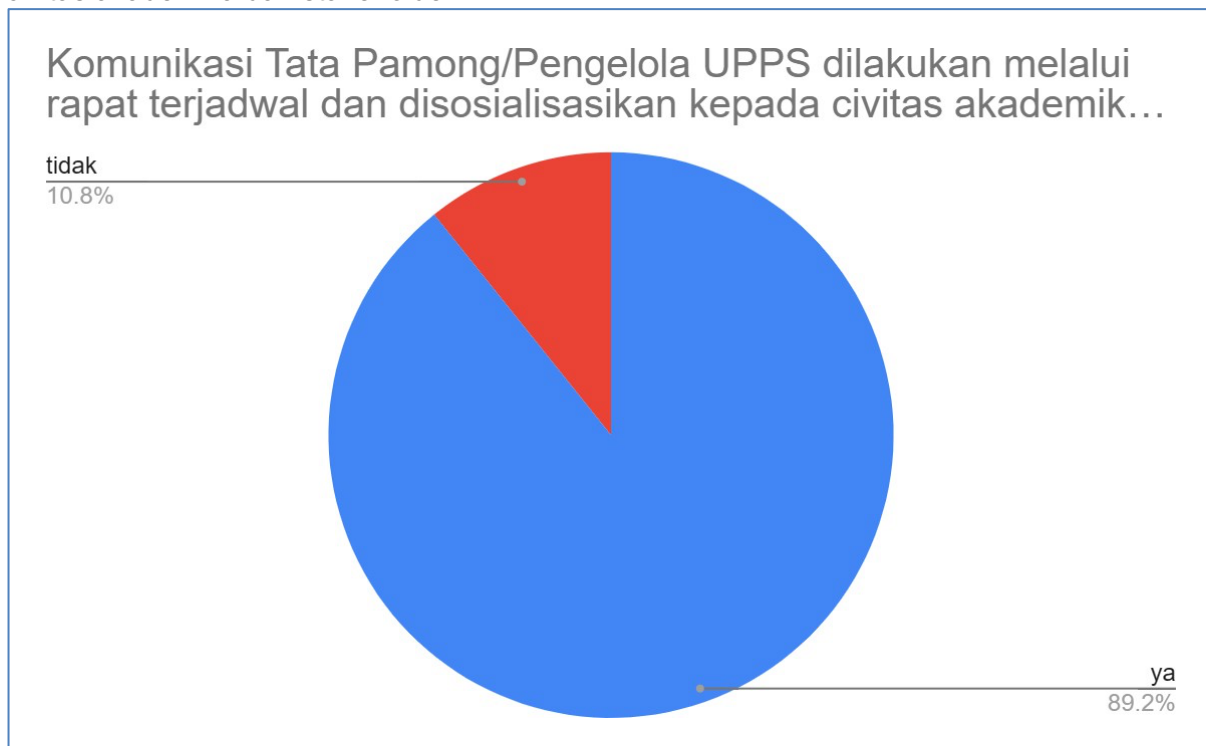
Apa saja bentuk pencapaian visi misi yang terealisasi
Struktur organisasi UPPS telah disosialisasikan kepada Civitas Akademika dan Stakeholder



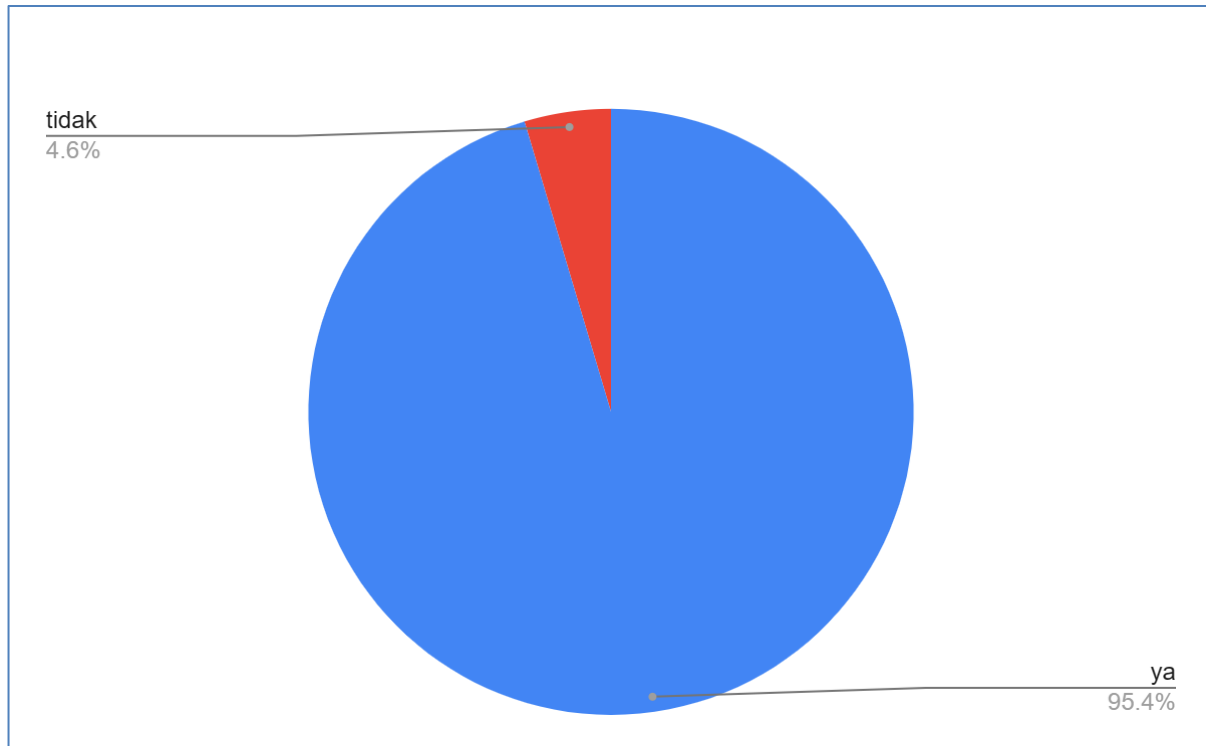
Tata pamong/pengelola di UPPS telah memenuhi 5 aspek good governance, yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab dan berkeadilan



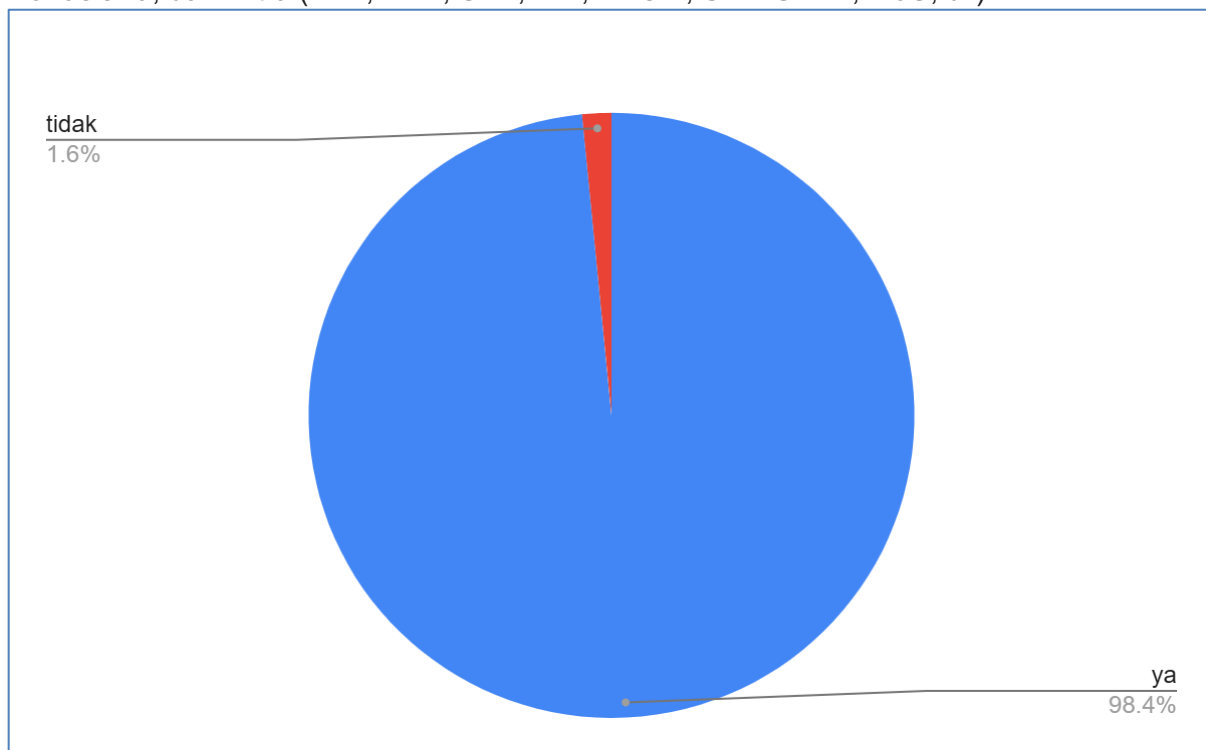
Komunikasi Tata Pamong/Pengelola UPPS dilakukan melalui rapat terjadwal dan disosialisasikan kepada civitas akademika dan stakeholder



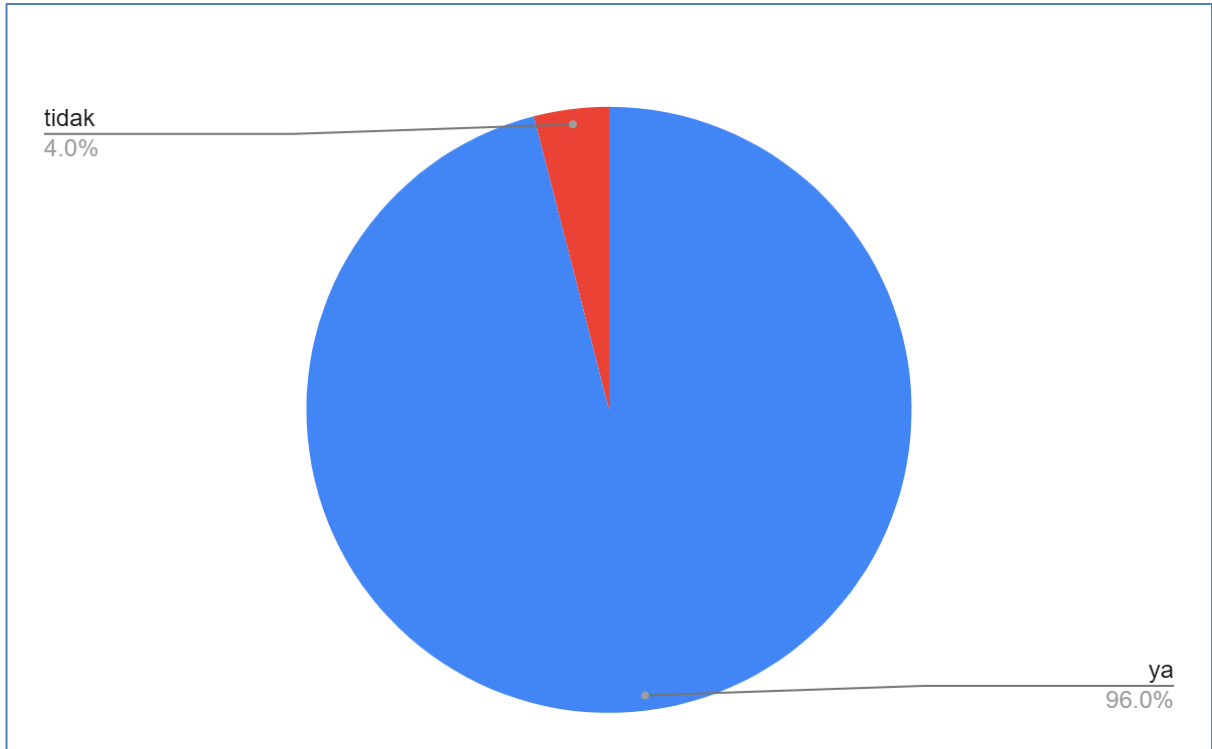
Tata pamong/Pengelola UPPS telah melakukan tugas sesuai deskripsi dalam Peraturan resmi (SK Dekan dan SK Rektor)



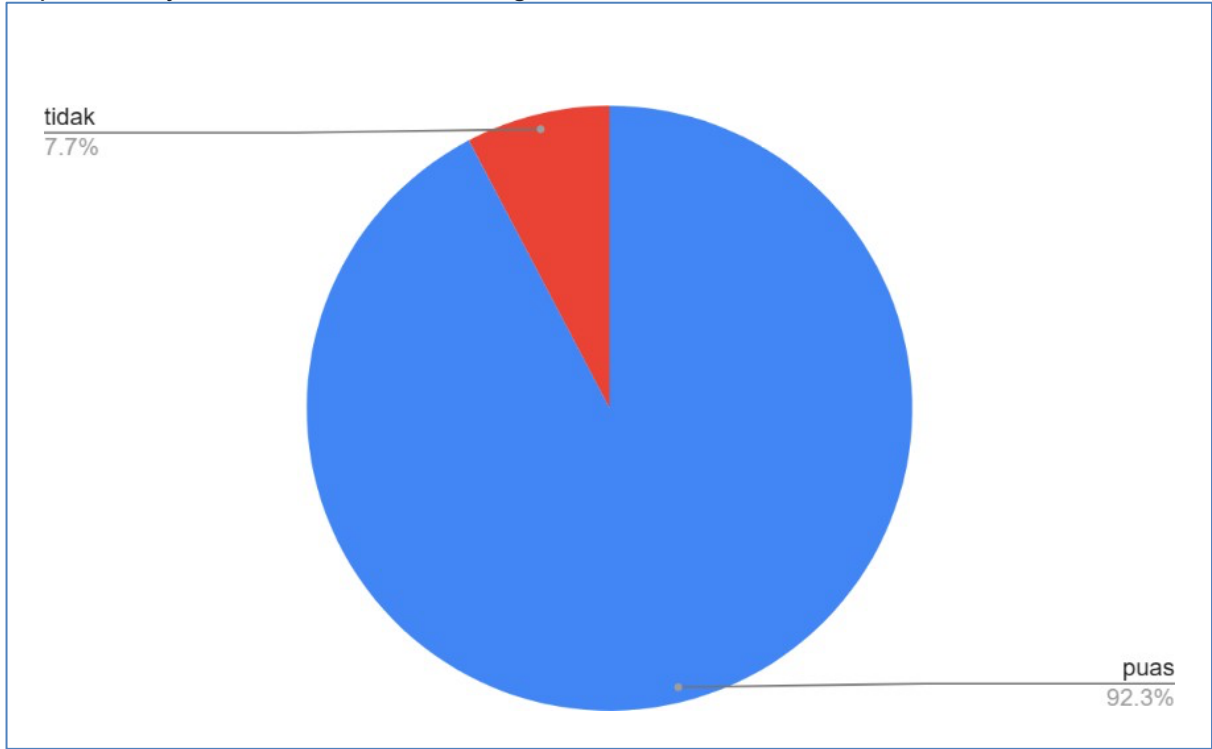
Tata pamong/Pengelola UPPS telah melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap dosen, tendik, mahasiswa, dan mitra (LKD, BKD, SKP, IBK, EDOM, SIMASTER, MoU, dll)



Tata pamong/Pengelola telah memenuhi fungsi planning, organizing, leading, staffing dan controlling (PPEPP)



Kepuasan layanan dan komunikasi dengan UPPS dan PS



Masukan kepada UPPS dan PS mengenai pelayanan, tata, kelola, dan tata pamong

1. Renstra Departemen mau dibawa ke mana belum jelas, setelah 1 dekade Departemen didirikan.
2. Fungsi manajemen UPPS terkait PPEPP khususnya pengembangan prodi belum berjalan dengan baik, sehingga seolah-olah prodi di DTHV berjalan sendiri-sendiri. Perlu meningkatkan koordinasi dengan prodi, dengan para dosen untuk menjangkau masukan yang kemudian ditindaklanjuti.
3. Pengembangan jejaring mitra masih dilakukan oleh Prodi secara mandiri, belum terkoordinir dengan baik oleh Departemen secara aktif, termasuk misalnya stakeholder gathering di level Departemen, yang berpeluang meningkatkan pendanaan penelitian, beasiswa dll.
4. Sebagai Departemen dg popularitas yang belum terlalu tinggi dan ceruk pasar mahasiswa dari kalangan mayoritas low-middle income, perlu strategi inovatif, di luar rutinitas dan kerja all out untuk keluar dari situasi ini. Mengingat dana masyarakat masih menjadi tulang punggung anggaran Departemen yang mayoritas pegawainya non-PNS.
5. Pengelolaan UPPS merupakan amanah dari 3 prodi (dosen, tendik dan mahasiswa), sehingga harus menjadi prioritas, memerlukan kerja keras dan keikhlasan karena menyangkut masa depan ribuan orang keluarga besar civitas akademik di DTHV.

Tingkatkan

Melayani dengan cukup baik lagi dengan pelayanan yang terbaik

Untuk tanda tangan pengajuan beasiswa mungkin lebih bisa dipercepat kembali

Untuk layanan terkait dengan beasiswa khususnya untuk D4 lebih di perbanyak lagi, karena sangat sedikit beasiswa yang didapat oleh D4.

Sebaiknya ketercapaian antara tujuan UUPS dan PS dengan ketercapaian program disosialisasikan melalui berbagai media termasuk media sosial, sehingga tercipta transparansi dan civitas maupun akademika bisa melihat data ketercapaian visi dan misi

evaluasi SDM, terkait pemerataan beban kerja

Lebih mengedepankan infrastruktur yang memadai agar kegiatan perkuliahan nyaman

Kerjasama yg sudah terjalin baik diteruskan

Adanya evaluasi berkala untuk setiap unit untuk mengetahui kendala ataupun perbaikan yang harus dilakukan demi kemajuan PS

Lanjtkan yg sdh baik

Cukup bagus, bisa dilanjutkan

Meningkatkan intensitas rapat departemen yg melibatkan seluruh civitas

Sudah berjalan baik. Perlu proses melengkapi sarana prasarana lab, kesediaan air untuk lab, lingkungan dept, dan dapur

Ditingkatkan lagi

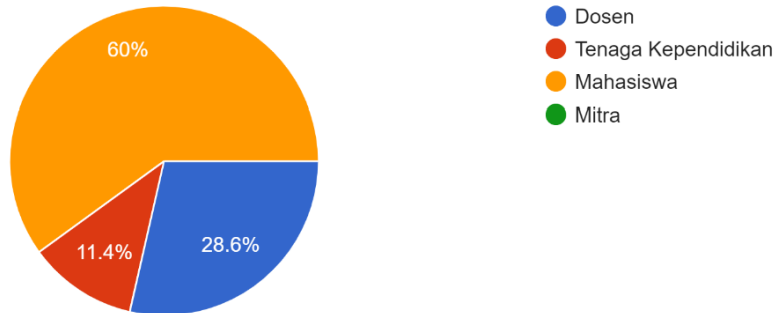
semoga menjadi lebih baik dan wifi lebih baik

Lebih baik lagi kedepannya dan ditingkatkan lagi pelayanannya

Kuisisioner Visi Misi dan Tata Pamong (2021-2023)

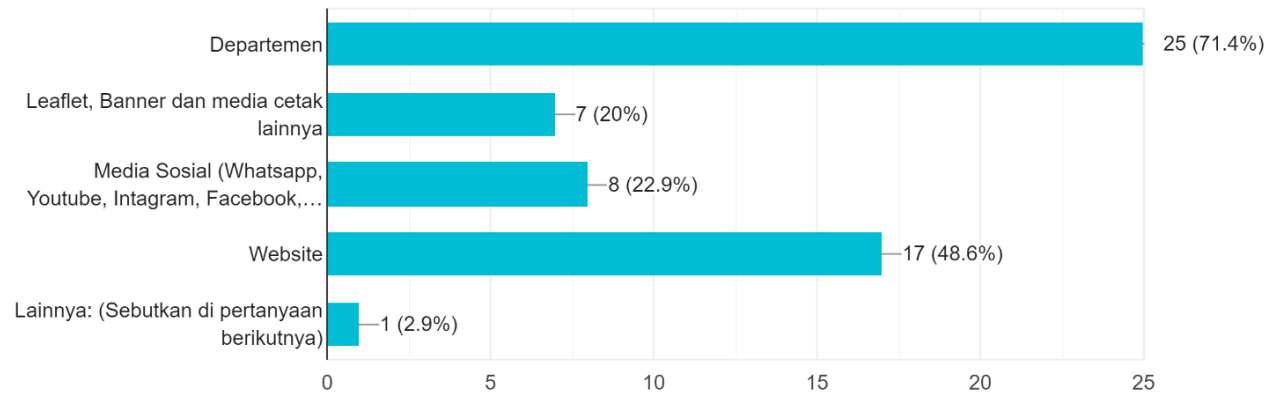
Peran sebagai:

35 responses



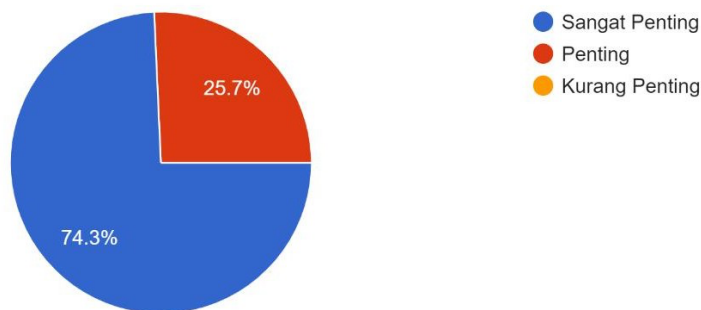
Dari mana Saudara mengetahui tentang Visi-Misi Departemen THV? (Bisa lebih dari 1 jawaban)

35 responses



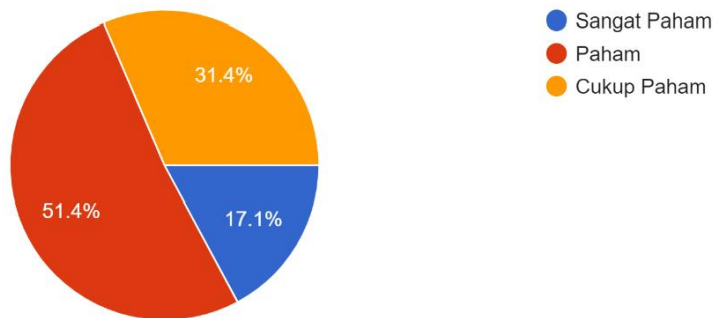
Menurut Saudara, seberapa pentingkah visi misi Departemen THV:

35 responses



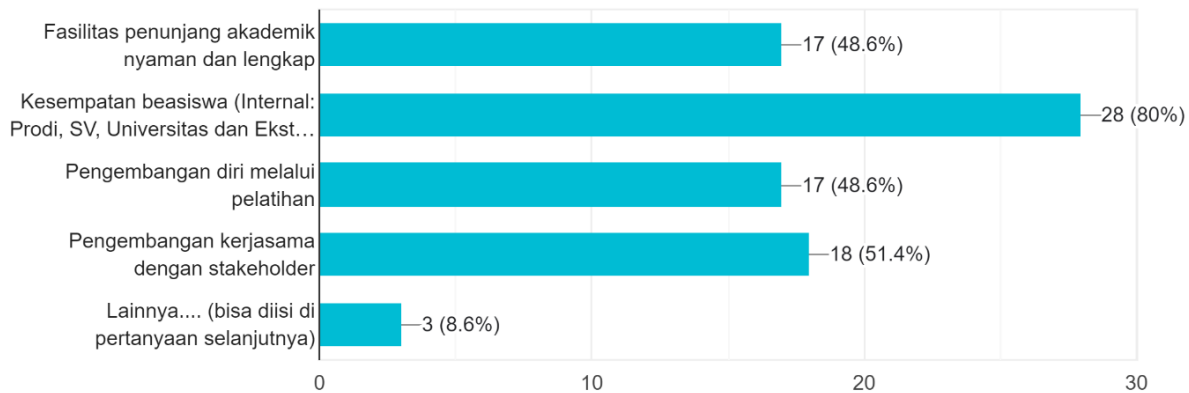
Pemahaman Saudara tentang visi misi Departemen THV:

35 responses



Apa saja bentuk pencapaian visi misi Departemen THV yang sudah terealisasi (Bisa lebih dari 1 jawaban)

35 responses



Lainnya:5 responses

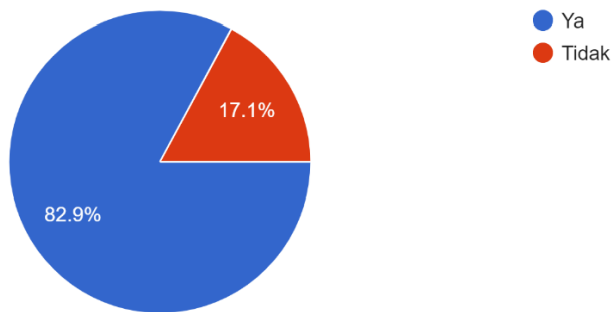
Update kurikulum sesuai perkembangan zaman

perolehan dana riset terapan dari eksternal serta pencapaian kinerja penelitian dan pengabdian dosen yang baik

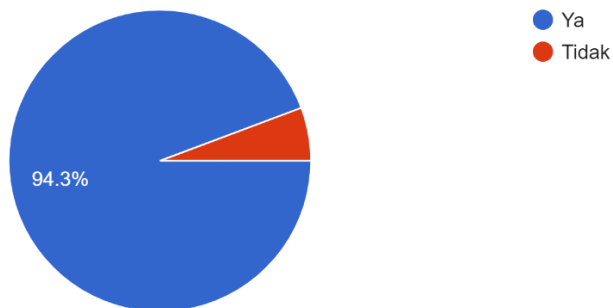
Peningkatan jumlah kualifikasi akademik dosen untuk S3

Pengabdian masyarakat dengan memberdayakan potensi lokal

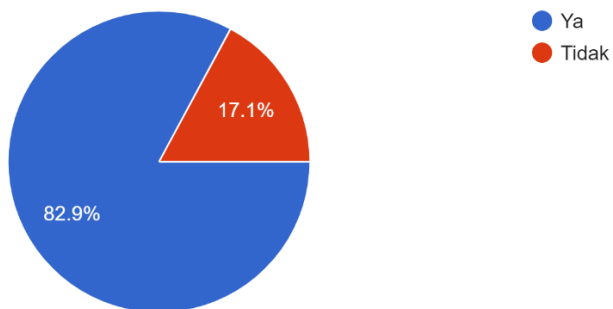
Struktur organisasi UPPS telah disosialisasikan kepada Civitas Akademika dan Stakeholder
35 responses



Tata pamong/pengelola di UPPS telah memenuhi 5 aspek good governance, yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab dan berkeadilan
35 responses

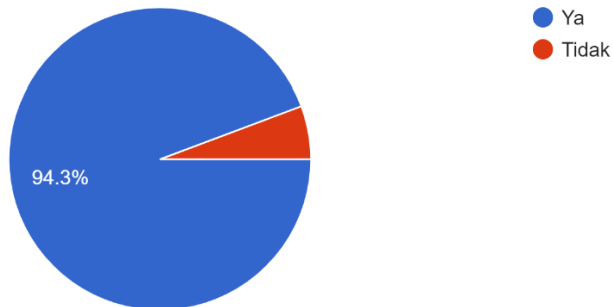


Komunikasi (Evaluasi, tindak lanjut, sosialisasi, dll) Tata Pamong/Pengelola UPPS dilakukan melalui rapat terjadwal dan disosialisasikan kepada civitas akademika dan stakeholder
35 responses



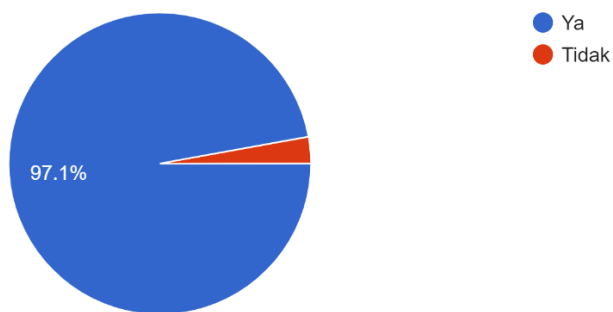
Tata pamong/Pengelola UPPS telah melakukan tugas sesuai deskripsi dalam Peraturan resmi (SK Dekan dan SK Rektor)

35 responses



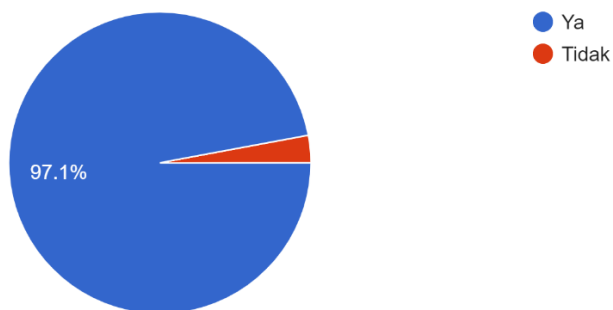
Tata pamong/Pengelola UPPS telah melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap dosen, tendik, mahasiswa, dan mitra (LKD, BKD, SKP, IBK, EDOM, SIMASTER, MoU, dll)

35 responses



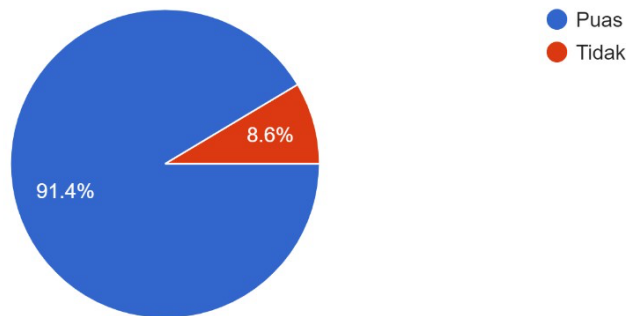
Tata pamong/Pengelola telah memenuhi fungsi planning, organizing, leading, staffing dan controlling (PPEPP)

34 responses



Kepuasan layanan dan komunikasi dengan UPPS dan PS

35 responses



Masukan kepada UPPS dan PS mengenai pelayanan, tata kelola, dan tata pamong

35 responses

Semoga bisa menjadi semakin baik kedepannya

Semoga lebih baik lagi

Fasilitas seperti toyagama yang kurang bersih mungkin dapat dibenahi, proyektor yang sudah buram, dan peralatan laboratorium diperbanyak sehingga dapat menunjang pembelajaran lebih baik lagi lebih di tingkatkan lagi

Mungkin kurangnya sosialisasi sehingga saya kurang mengetahui adanya UPPS dan PS semoga lebih baik

Semoga menjalankan tugas sesuai dengan amanah

Ada fasilitas fotocopy di department

Semoga lebih terbuka dalam menyampaikan informasi dan segala hal yang dikerjakan

Digiatkan komunikasi/hearing dengan dosen dan staff akademik. Penjaringan ide² dari bottom~up tingkatkan kembali pelayanan untuk lebih baik lagi

Semoga lbh ditingkatkan

Menurut saya, layanan maupun tata kelola UPPS dan PS perlu dipertahankan dan dievaluasi untuk peningkatan lebih lanjut. Terima kasih.

Sudah bagus

Ditingkatkan lebih baik lagi kedepannya

sarana dan prasarana mahasiswa supaya ditingkatkan misal wifi dan kebutuh makan siang di kantin

Tingkatkan lagi

lebih meningkatkan pelayanan yang baik, ramah, dan cekatan

Baik mohon dilanjutkan

Sosialisasi upps secara terjadwal

Adanya evaluasi dan sharing rutin yang dilakukan oleh pengelola dan mitra guna peningkatan pelayanan akademik

perlu skema kaderisasi yang terstruktur dan sistematis terkait kepengurusan UPPS dan PS

Kualitas pelayanan, tata kelola, dan tata pamong terus ditingkatkan

peningkatan koordinasi antar bagian-bagian di departemen (laboratorium, akademik, keuangan, SDM, umum)

lebih cepat merespon permasalahan

Peningkatan fasilitas akademik, seperti jaringan internet yang lebih powerfull

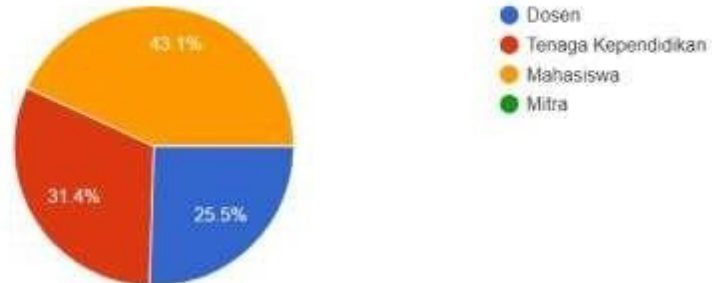
Cukup

Lebih mengedepankan infrastruktur yang memadai agar kegiatan perkuliahan nyaman

Evaluasi Kinerja Tata Pamong/Pengelola (2023)

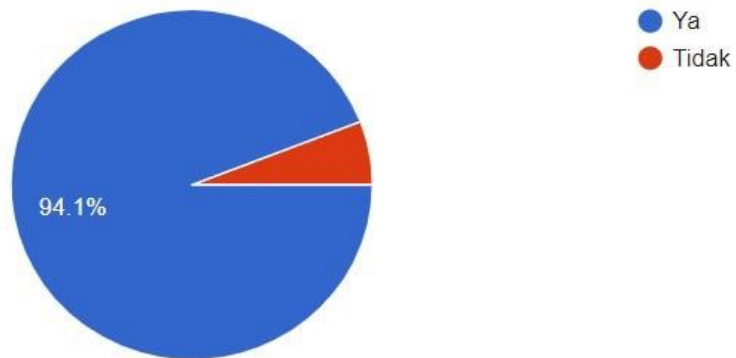
Peran sebagai:

51 responses



Struktur organisasi UPPS telah disosialisasikan kepada Civitas Akademika dan Stakeholder

51 responses



Tata pamong/pengelola di UPPS telah memenuhi 5 aspek good governance, yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab dan berkeadilan

51 responses



1). Kredibilitas. integritas dan kapasitas UPPS dalam menjaga dan membawa nama baik perguruan tinggi sebagai masyarakat ilmiah dan berperadaban. 2). Transparansi: objektivitas UPPS dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan memberikan informasi-informasi yang jelas, akurat, mudah diakses dan dipahami serta dapat dipertanggung jawabkan oleh semua pemangku kepentingan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. 3). Akuntabilitas. Evaluasi kinerja yang telah dihasilkan oleh UPPS. 4). Bertanggung jawab. Refleksi tanggung jawab UPPS dan bagiannya dalam mematuhi segala tugas-tugas dalam pekerjaan, aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan pemerintah terkait. dan 5). Berkeadilan. Evaluasi UPPS dalam menjaga kewajaran dan kesetaraan bagi setiap anggota, pemangku kepentingan dan stakeholders lainnya.

Komunikasi (Evaluasi, tindak lanjut, sosialisasi, dll) Tata Pamong/Pengelola UPPS dilakukan melalui rapat terjadwal

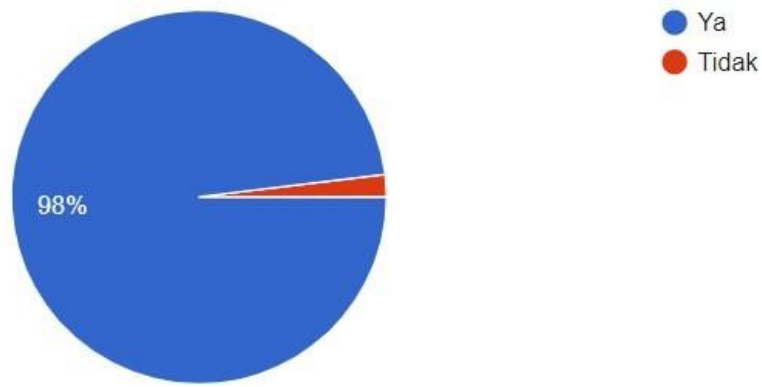
Tata pamong/Pengelola UPPS telah melakukan tugas sesuai deskripsi dalam Peraturan resmi (SK Dekan dan SK Rektor)

51 responses



Tata pamong/Pengelola UPPS telah melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap dosen, tendik, mahasiswa, dan mitra (LKD, BKD, SKP, IBK, EDOM, SIMASTER, MoU, dll)

51 responses



Tata pamong/Pengelola telah memenuhi fungsi planning, organizing, leading, staffing dan controlling

49 responses



Perwujudan tata kelola yang baik di Departemen THV dan Prodi S.Tr. TekVet mencakup 5 pilar, yang telah sesuai dengan tata nilai yang dianut yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan berkeadilan. Penjabaran dari 5 pilar *good governance* sesuai dengan tata nilai yang dianut pada Prodi S.Tr. TekVet, antara lain:

- a) Kredibel. Untuk mewujudkan visi dan misi program studi, seluruh pihak senantiasa dilibatkan secara proporsional dalam pengambilan keputusan di tingkat program studi. Pelibatan tersebut terutama diaplikasikan melalui rapat koordinasi bulanan Prodi S.Tr. TekVet yang dihadiri oleh tenaga pendidik maupun kependidikan. Untuk

mengakomodasi semua unsur dalam program studi telah diupayakan untuk setiap dosen Prodi S.Tr. TekVet agar terlibat dalam beberapa tim seperti tim kurikulum, tim akreditasi dan panitia magang, yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Program Studi. Unsur kredibel yang tercermin yaitu semua kegiatan operasional prodi dipercayakan kepada tim kepanitiaan tersebut untuk dapat dilaksanakan secara lancar dan sukses tentunya melalui pengawasan dan koordinasi dengan Ketua Program Studi.

- b) **Transparan.** Salah satu contoh cerminan penyelenggaraan organisasi yang demokratis dan transparan adalah ketika proses pergantian ketua program studi. Mekanisme pemilihan ketua program studi baru dilakukan pada tingkat departemen. Rapat dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh seluruh anggota departemen. Ketua Program Studi yang lama menyampaikan laporan kinerja pada masa kepemimpinannya secara transparan kepada seluruh peserta sidang untuk dilakukan evaluasi secara bersama-sama dan terbuka. Pimpinan sidang kemudian melakukan sosialisasi secara transparan mengenai seluruh tata aturan pemilihan baik menyangkut siapa yang berhak dipilih dan memilih serta bagaimana mekanisme pemilihannya. Diutamakan pemilihan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, apabila pemilihan harus dilakukan secara voting, seluruh pihak yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih dapat menggunakan haknya secara leluasa tanpa adanya tekanan dari pihak lain hingga akhirnya terpilih ketua program studi secara transparan dan demokratis sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Bentuk transparansi terhadap mahasiswa salah satunya dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin dengan ketua program studi minimal sekali setiap semester. Pertemuan ini selain dimaksudkan untuk mempererat hubungan baik dengan mahasiswa juga untuk mendiskusikan hal-hal terutama yang berkaitan dengan kualitas dan kelancaran pelayanan akademik kepada mahasiswa. Beberapa permasalahan yang sering dibahas antara lain mengenai mekanisme percepatan kelulusan, baik dalam hal penyelesaian tugas akhir, alokasi dana untuk organisasi mahasiswa, beasiswa, magang, serta hal yang berkaitan dengan fasilitas pelayanan akademik. Pertemuan yang serupa juga dilakukan di tingkat departemen, dengan mengundang perwakilan mahasiswa dari masing-masing program studi. Pelibatan mahasiswa pada kegiatan penelitian dosen, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan reuni alumni, proyek-proyek kerjasama dengan instansi lain dan berbagai kegiatan seminar maupun telah menjadi kebiasaan program studi. Bentuk lain perwujudan transparansi dalam hal penilaian adalah bahwa setiap dosen selalu memberikan penjelasan mengenai sistematika atau metode penilaian pada kontrak kuliah di perkuliahan pertama setiap awal semesternya. Dengan demikian mahasiswa mengetahui asal usul nilai yang mereka dapatkan tanpa adanya komplain di akhir semester seandainya mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Dalam hal keuangan, bentuk transparansi dilakukan melalui SIMASTER (Sistem Informasi Terpadu) UGM, dimana setiap dosen dan tenaga kependidikan dapat mengakses rincian gaji, tunjangan dan honorarium lain melalui sistem UGM dengan sangat jelas. Selain itu, di tingkat departemen, sosialisasi mengenai jumlah anggaran untuk kegiatan mahasiswa selalu dilakukan pada setiap awal tahun anggaran.
- c) **Akuntabel.** UPPS maupun program studi membutuhkan perencanaan yang matang baik yang menyangkut aktivitas, sarana-prasarana dan biaya, sumberdaya manusia maupun sistem tata akademik agar dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan BAN-PT (RKAT) disusun secara terbuka dan transparan, serta berdasarkan peraturan yang berlaku, misalnya Standar Biaya Universitas (SBU) UGM tahun 2018. Masing-

masing prodi memiliki perencanaan tersendiri, untuk kemudian digabungkan di RKAT Departemen (UPPS). Seluruh pihak dapat mengajukan pendapat mengenai kegiatan yang akan dilakukan berikut dengan anggarannya dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma selama satu tahun ke depan. Konsekuensinya, semua pihak yang mengajukan anggaran untuk suatu kegiatan harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan perencanaan. Pada akhirnya, pertanggungjawaban ini dapat berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) diperiksa oleh PUMK, Ketua Program Studi dan Pengurus UPPS, dan secara berkala diaudit oleh KAI UGM, KAP dan BPK.

- d) Bertanggung jawab. Bentuk tanggungjawab setiap anggota program studi, khususnya tenaga kependidikan tercermin dari pemenuhan tugas pokok dan fungsi sesuai kamus jabatan UGM. Penilaian dilakukan oleh atasan langsung (Ketua Program Studi), Ketua Departemen hingga penilaian teman sejawat. Instrumen penilaian kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Insentif Berbasis Kinerja (IBK) maupun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Adapun tanggungjawab dosen untuk melaksanakan Tri Dharma dimonitor melalui Laporan Kinerja Dosen (LKD) yang dinilai oleh asesor dan Beban Kerja Dosen (BKD) yang disetujui oleh Ketua Departemen yang tidak terpisahkan dari sistem Insentif Berbasis Kinerja (IBK) maupun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Secara khusus, di dalam perkuliahan, tanggungjawab dosen dalam mengampu mata kuliah salah satunya tercermin dari pemenuhan presensi tatap muka perkuliahan sesuai kontrak kuliah, termasuk menyerahkan nilai ujian tepat waktu.
- e) Adil. Bentuk keadilan yang diterapkan diantaranya perlakuan Ketua Program Studi kepada seluruh staf, baik dalam hal pemberian tugas, penilaian, maupun pemberian peringatan atau hukuman apabila ada pelanggaran. Ketika ada informasi mengenai kecenderungan pelanggaran salah satu kode etik oleh seorang staf, maka Ketua Program Studi segera memberikan peringatan secara persuasif dan bertahap serta mengawal proses perbaikan kinerja staf tersebut. Rekam jejak kinerja tenaga pendidik dan kependidikan dimonitor oleh Ketua Program Studi melalui logbook SKP maupun penilaian IBK secara objektif tanpa membedakan pegawai satu dengan lainnya. Sementara itu, salah satu bentuk keadilan untuk dosen tercermin dalam pemberian kesempatan yang sama mengakses dana penelitian dan pengabdian.